

Pengaruh Kolonialisme pada Morfologi Ruang Kota Jawa

by Rony Gunawan Sunaryo

Submission date: 11-Mar-2019 06:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 1091334324

File name: SERAP_Rony_Gunawan_S_-_Full_Teks.pdf (418.69K)

Word count: 5212

Character count: 34152

3

Seminar Nasional Riset Arsitektur dan Perencanaan (SERAP) 3
 MANUSIA dan RUMAH dalam ARSITEKTUR dan PERENCANAAN
 22-23 Agustus 2014, Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada
 Jalan Grafika No.2 Kampus Bulaksumur UGM Yogyakarta

3

PENGARUH KOLONIALISME PADA MORFOLOGI RUANG KOTA JAWA PERIODE 1600-1942

¹Rony Gunawan Sunaryo, ²Nindy Soewarno, ³Ikaputra, ⁴Bakti Setiawan

ABSTRAK

Penjelasan tentang pengaruh kolonialisme terhadap pembentukan perkotaan Jawa selama ini lebih banyak menekankan pada aspek sosial, ekonomi dan politik, antara lain karena pendekatan studi yang condong pada kesejarahan. Kajian-kajian spasial yang menekankan pembentukan perkotaan Jawa, terutama pada periode lahir, tumbuh dan berkembangnya kota sangat penting sebagai latar pengetahuan pengetahuan praktek dan pengajaran perencanaan dan perancangan perkotaan di Indonesia. Pendekatan praktek maupun pengajaran arsitektur dan perencanaan kota yang deterministik menggunakan preseden perkotaan yang memiliki latar sejarah dan budaya yang berbeda dapat mengarahkan pada perkembangan perkotaan yang tidak kenal jati dirinya. Pendekatan tipomorfologi yang diperkaya dengan kajian historis dalam penelitian ini mencoba mendapatkan penjelasan yang sederhana tapi tetap komprehensif mengenai peran kolonialisme dalam morfologi perkotaan Jawa.

Kata Kunci : Tipomorfologi, kolonialisme, kota Jawa

PENDAHULUAN

Kota-kota besar⁵ yang ada di Jawa yang saat ini kita huni dapat dikatakan semuanya dibentuk dan dikembangkan pada periode 200 – 300 tahun yang lalu, yaitu pada periode kolonial⁶. Elemen-elemen utama pembentuk struktur kota yang diletakkan pada periode kolonial telah membuat kota-kota ini terhubung dengan jaringan regional dan global dan terus mengembangkan vitalitasnya hingga saat ini. Kajian-kajian pengaruh periode kolonial pada perkembangan perkotaan Jawa banyak dilakukan oleh para ahli antropolog (Lombard, 1996); sejarah (a.l. Ricklefs, 2008; Colombijn dkk, 2005; Basundoro, 2012; Margana & Nursam, 2010; Soekiman, 2011), studi perkotaan (Roosmalen, 2008; Gill, 1995; Handinoto, 2010; Wiryomartono, 1995) dan arsitektur (Akihary, 1998; Sumalyo, 1988; Handinoto, 1996). Secara umum kajian-kajian tersebut mengarah pada pemahaman bahwa periode kolonial merupakan periode yang menentukan, sebagai awal pembentukan karakter kota dan ruang kota di Indonesia. Meskipun demikian, kajian spasial yang dapat menggambarkan secara komprehensif pengaruh kolonialisme dalam pembentukan struktur perkotaan di Jawa masih terbatas.

Kajian perkotaan Jawa pada periode kolonial secara umum didominasi disiplin sejarah, budaya, politik, antropologi dengan penekanan pada aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian yang dilakukan sebagai latar tulisan ini mencoba lebih mengangkat aspek spasial, terutama transformasi dan struktur perkotaan Jawa yang terbentuk pada periode kolonial. Melalui kajian eksplorasi di beberapa kota terpilih diharapkan ditemukan gambaran pengaruh kolonialisme pada proses pembentukan struktur perkotaan di Jawa.

¹ Rony Gunawan Sunaryo, ST., MT.; Program Studi Arsitektur, FTSP, Universitas Kristen Petra; Mahasiswa Program Doktor Jurusan Arsitektur & Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada; ronygunawan@petra.ac.id

² Prof. Ir. Nindy Soewarno, M.Phil., Ph.D; Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

³ Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D; Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

⁴ Prof. Ir. Bakti Setiawan., MA., Ph.D; Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

⁵ Mengkategorikan kota besar dalam parameter kepadatan penduduk juga akan merujuk kepada parameter ekonomi, antara lain : Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya

⁶ Nas (1986) membagi perodesasi sejarah perkembangan kota Indonesia secara umum kepada pada tiga bagian besar : pra kolonial, kolonial dan paska kolonial.

METODE MORFOLOGI PERKOTAAN

Morfologi perkotaan berkaitan dengan pengetahuan tentang logika bentuk, dalam hal ini bentuk kota. Morfologi perkotaan berkaitan dengan beberapa disiplin ilmu dan melibatkan pencarian pada karakter fisik, struktur, relasi dan transformasi suatu obyek dan elemen pembentuknya. (Pinzon Cortes, 2009).

Moudon (2003), mendeskripsikan studi tipomorfologi sebagai bagian tradisi panjang dalam usaha mempelajari kota, bentuk kota dan terutama proses sosio-ekonomi yang mengarahkan terbentuknya kota. Terminologi “Studi Tipomorfologi” pertama kali diajukan oleh Aymonino, seorang arsitek Italia di tahun 60-an., menggunakan tipe-tipe bangunan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk kota dan proses yang memberi bentuk pada *urban fabric*. Penganut pendekatan ini, tipomorfolog, meyakini bahwa bangunan dan ruang terbuka yang berhubungan dengannya merupakan elemen esensial dari bentuk kota. Langkah pengklasifikasiannya dengan tipe bertujuan untuk menjelaskan karakter fisik suatu kota.

7 *Typomorphological studies are object oriented. However, the built environment is treated not as a static object but as one constantly changing in the hands of people living in and using it.* (Moudon, 2003: 375)

Menurut Moudon, terminologi ‘morfogenesis’ – studi mengenai proses yang mengarahkan pada pembentukan dan transformasi lingkungan terbangun – lebih disukai daripada ‘morfologi’ – studi mengenai bentuk- untuk mendefinisikan karakter penelitian tipomorfologi. Lebih lanjut, pendekatan ini mengakarkan dirinya kepada sejarah, penelusuran masa lalu sangat kuat dan tidak dapat disangkal berakar pada kedinamisan semua lingkungan perkotaan. Pendekatan pada sejarah ini secara langsung dan spesifik berkaitan dengan lingkup profesi desain dan perencanaan.

Konteks sejarah dan budaya dalam morfologi perkotaan

Hubungan antara sejarah kota dan artefak fisik kota bersifat bolak-balik, penelusuran sejarah kota akan menuntun kita pada pemahaman proses yang membentuk sebuah kota, sebaliknya melalui artefak elemen-elemen kota, kita dapat menelusuri sejarah kota. Pemahaman kita tentang “morfologi perkotaan” tidak dapat dilepaskan dari wujud fisik kota yang terbentuk utamanya oleh kondisi fisik-lingkungan maupun interaksi sosial – ekonomi masyarakat yang dinamis. Morfologi perkotaan mempelajari perkembangan bentuk fisik di kawasan perkotaan, yang tidak hanya terkait dengan arsitektur bangunan, namun juga sistem sirkulasi, ruang terbuka, serta prasarana perkotaan (khususnya jalan sebagai pembentuk struktur ruang yang utama). Secara garis besar, wujud fisik kota tersebut merupakan manifestasi visual dan parsial yang dihasilkan dari interaksi komponen-komponen penting pembentuknya yang saling mempengaruhi satu sama lainnya (Allain, 2004 dalam Widodo, 2004).

Artikulasi fisik dari kota dan arsitekturnya merupakan refleksi dari ‘jiwa jaman’ yang terdiri dari aspek sosio-politik-budaya dari masyarakatnya yang berkembang seiring waktu. Terkait dengan waktu, menurut Widodo (2004) jaringan perkotaan dari sebuah kota dapat dianalogikan sebagai tumpukan dari jaringan (tissue) yang terdiri dari lapisan (layer) yang berbeda dari periode waktu yang berbeda-beda.

Kota menurut Bacon (1974) merupakan pencapaian terbesar umat manusia. Bentuk kota selalu merupakan pernyataan dari peradaban umat manusia. Bentuk kota terdeterminasi oleh banyak keputusan yang dibuat oleh orang-orang yang tinggal dan pernah tinggal di dalamnya. Senada dengan pemikiran Bacon, Kostof (1991) meyakini bahwa bentuk kota merupakan perwujudan makna, makna pada akhirnya berujung pada sejarah, dalam konteks budaya. Pemahaman yang menyeluruh mengenai budaya, mengenai struktur masyarakat dalam berbagai periode sejarah di bagian dunia yang berbeda, semakin baik kita mampu membaca lingkungan terbangun mereka.

Kaitan anatara konteks sejarah suatu kota dengan tipomorfologi antara lain dapat diteliti dalam hal bagaimana dan kapan variasi tipologi suatu bentuk muncul, apakah tipologi spesifik selalu mengindikasikan fungsi yang sama, atau apakah bentuk yang sama tetapi fungsinya berubah seiring waktu (Moholy-Nagy 1968, Kostoff 1991, 1992, Hall 1998 dalam Cuthbert, 2006).

Kritik pada morfologi perkotaan

Cortes (2009) mengutip pernyataan Panerai dan Castex dalam to 'Formes Urbaines de l'ilot a la barre' (1977) mengenai pendekatan morfologi perkotaan yang "terlalu historis untuk para teoritis, tidak cukup matematis di mata para metodis, terlalu empirikal dalam gaya para sejarawan". Otokritik Panerai dan Castex sebenarnya menggambarkan kelemahan pendekatan morfologi yang cenderung menyandarkan pada aspek fisik yang deterministik dibanding melihat kepada aspek pengaruh ekonomi, sosial dan fungsi (Carmona, 2003). Meskipun demikian hal tersebut dapat juga dilihat dari sudut sebaliknya, morfologi perkotaan memiliki kekuatan sebagai pendekatan yang berkarakter kolaboratif dan interdisipliner sehingga mendapatkan pemahaman yang holistik tentang sejarah dan morfologi kota (Widodo, 2004)⁷.

Lebih lanjut, aspek kehati-hatian perlu diterapkan dalam melakukan analisa morfologis, terutama karena faktor perbedaan sejarah dan budaya suatu tempat (Kostof, 1991). Cuthbert (2006) mengingatkan kita pada kenyataan perbedaan konteks historis perkotaan Barat dan Timur. Perkotaan Barat yang tumbuh dan berkembang karena revolusi industri berbeda dengan perkotaan Timur (dalam hal ini Asia Tenggara) yang tumbuh dan berkembang karena imperialisme dan kolonialisme.

KAJIAN

Pemahaman konsep kota pada periode pra kolonial dapat mengacu kepada pada peran Sultan yang sangat dominan dalam merencanakan bentuk kota di Jawa. Wilayah-wilayah di luar tembok kota (kraton) digambarkan merupakan satuan-satuan wilayah hunian yang berkumpul atas dasar asal (etnis) atau keahlian (profesi). Santoso (2006) menggambarkan Banten pada abad 16 sebagai wilayah dengan pusat kekuasaan kraton dengan kelompok-kelompok hunian otonom yang tersebar di luar kraton. Wilayah otonom tersebut dibedakan berdasar asal atau kelompok etnis, dan mereka bebas mengatur bentuk dan struktur huniannya, akan tetapi penguasa wilayah harus tunduk dan berkoordinasi dengan Sultan Banten. Sedikit berbeda dengan Banten, Yogyakarta di awal abad 19 digambarkan berpusat pada wilayah keraton dan negara. Masing-masing wilayah hunian di luar keraton dikelompokkan berdasar keahlian dan profesinya (Handinoto, 2010).

Pengaruh kolonial Eropa pada perencanaan kota di Jawa berlangsung pada periode yang panjang selama 3 abad. Proses tersebut diawali dengan didirikannya pos-pos dagang Belanda di awal 1600 berupa kompleks hunian para pedagang Belanda dengan bangunan-bangunan fungsional (Gill, 1995). Seiring waktu pos dagang tersebut berkembang menjadi benteng pertahanan, hingga meluas dan menjadi kota benteng. Pola administrasi ekonomi dan kekuasaan merupakan penentu dari struktur kota di Jawa pada saat itu. Hingga akhir abad 18 pola administrasi ekonomi dan kekuasaan di kota-kota Jawa bersifat parsial dan berlaku setempat⁸. Awal abad 19 dapat dikatakan merupakan awal dari penerapan prinsip kolonial dalam perencanaan kota di Jawa. Kebijakan Daendels dalam sistem administrasi pemerintahan dan kebijakan untuk membangun Jalan Raya Pos memperlihatkan visinya untuk menyatukan Jawa ke dalam satu sistem administrasi. Kondisi ini juga terlaksana berkat rintisan VOC dalam penetrasi kekuasaan di Jawa sejak didirikannya Pos Dagang pertama mereka di Batavia awal abad 17 hingga akhir abad 19, bisa dikatakan hampir seluruh wilayah Jawa telah mengakui kedaulatan koloni Belanda.

Prinsip perencanaan kolonial pertama di Jawa bisa ditelusuri di Batavia, sebuah kota yang dikembangkan dari pos dagang hingga menjadi kota pertama sekaligus terbesar yang dibangun Belanda di luar negerinya (Gill, 1995). Catatan yang mungkin lebih mendekati adalah catatan mengenai konsep-konsep kota ideal dari Simon Stevin (1548-1620), seorang *Quartermaster-General* pada masa Prince Maurice dari Nassau. Stevin mengeluarkan konsep-konsep kota ideal termasuk antara lain parameter dan elemen-elemen utama kota⁹. Beberapa kajian morfologi kota mereferensikan model benteng

⁷ Pendekatan yang dilakukan harus bersifat sinkronis (antar lapisan yang berbeda) dan diakronis (antar periode sejarah)

⁸ Lihat penjelasan Crib (2010) mengenai pembagian administrasi di Jawa dari abad 17 hingga 20

⁹ Riset oleh van den Heuvel (2005) cukup lengkap membahas peninggalan Simon Stevin di bidang Arsitektur, Perencanaan Kota dan Sipil : 'De Huysbou' A reconstruction of an unfinished treatise on architecture, town planning and civil engineering by Simon Stevin

(*Sterctenbouwing*) dan konsep kota ideal Stevin sebagai dasar perancangan benteng VOC dan kota benteng di periode awal kolonial¹⁰.

Pada perkembangan selanjutnya sejak paruh kedua abad 18 pola kota benteng mulai ditinggalkan. Handinoto (2010: 226-230, 430-431) menggambarkan bahwa dari tipologi kota pada periode awal abad 18 sampai akhir abad 19 terdapat dua karakter berbeda, yaitu Kota Hindia Belanda Lama dan Kota Hindia Belanda Baru. Pola Kota Hindia Belanda Lama terbentuk lebih awal, memiliki dua pusat kota, yaitu pusat kota pribumi - dengan elemen utama Alun-alun dan Kabupaten - dan pusat kota kolonial - dengan elemen utama gedung Residen atau Asisten Residen. Sementara pola kota Hindia Belanda Baru terbentuk lebih kemudian dengan satu pusat kota yang dicirikan bergabungnya pusat pemerintahan pribumi dan kolonial dalam satu lokasi, yaitu di alun-alun¹¹.

Pola kota yang kemudian terbentuk pasca Undang-Undang Desentralisasi di awal abad 20 adalah terbentuknya pusat kota baru yang berusaha tampil modern dan melepaskan diri dari citra tradisional Jawa. Elemen baru berupa Kantor Kotamadya berikut taman besar dibangun di lokasi yang berjauhan dengan pusat kota lama. Handinoto (2010) menjelaskan salah satu latar belakang pembangunan kota baru ini adalah keinginan untuk lebih memperlihatkan eksistensi kekuasaan pemerintah kolonial di tanah jajahan¹². Paradoks dengan pendapat Handinoto mengenai konsep pembangunan kota baru, pada skala bangunan justru muncul langgam arsitektur yang berusaha menggali kekayaan budaya lokal Hindia Belanda. Pada masa ini arsitektur bangunan penting di Jawa sudah dirancang oleh arsitek-arsitek profesional berpendidikan dari Eropa. Diantara para arsitek tersebut muncul gagasan untuk menghadirkan konsep arsitektur yang benar-benar lahir dan spesifik Hindia Belanda. Usaha-usaha Karsten, Pont dan Schumacher merupakan usaha menghadirkan arsitektur yang otentik Hindia Belanda – selanjutnya disebut langgam Indis. Demikian juga untuk konsep perkotaan, yang kemudian didominasi oleh karya Karsten. Disertasi Roosmalen (2010) memperlihatkan bahwa konsep-konsep perencanaan kota Karsten diwarnai keinginannya untuk tanggap pada kondisi iklim tropis dan sifat sosialisnya yang membongkar aturan bertempat tinggal berdasar etnis, digantikan dengan pengaturan berdasar posisi ekonomi.

TEMUAN

Periode 1600-1700

Awal proses kolonisasi Jawa ditandai dengan terbangunnya Batavia, permukiman koloni Belanda pertama di Jawa pada tahun 1619. Batavia merupakan pelabuhan perdagangan penting pada abad 17, sehingga penguasaannya merupakan keuntungan besar bagi koloni Belanda awal. Penguasaan pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa tidak menunggu lama, sesuai kebijakan VOC¹³ untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa. Peta De Graaf menggambarkan sebaran pos-pos dagang Belanda di 1690 sudah meliputi 15 wilayah dari barat hingga timur Jawa¹⁴. Mengacu pada peta Crib, tahun 1749, separuh Jawa praktis sudah dikuasai oleh VOC dengan pusat-pusat wilayah : Batavia, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Juana, Japara, Rembang, Tuban, Surabaya, Balambangan.

Struktur kota pada periode ini tidak dapat dikatakan sebagai satu kesatuan homogen, kota merupakan kumpulan permukiman berbasis etnis yang dapat dikatakan otonom satu sama lain¹⁵. Faktor yang menyebabkan konsentrasi permukiman ini adalah kepentingan perdagangan, sehingga dapat dikatakan pasar, pelabuhan dan dermaga merupakan elemen pengikat kota pada periode ini. Elemen pembentuk

¹⁰ Antara lain kajian Kwanda (2010:23) tentang Profil Kawasan Cagar Budaya Surabaya

¹¹ Disertasi Gill (1995) mengajukan teori bahwa struktur kota Jawa sangat dipengaruhi sistem administrasi pemerintahan yang berlaku, perubahan pada sistem tersebut mempengaruhi pula struktur kota yang terbentuk.

¹² Desentralisasi muncul karena urbanisasi yang pesat di awal abad 20, populasi penduduk kota yang padat menimbulkan kesadaran bahwa kota perlu pengurus lokal dan tidak tergantung pada Pemerintah Pusat Batavia. Perlu dicatat sebelum itu, faktor liberalisasi di Negeri Belanda, dibukanya Terusan Suez merupakan faktor global yang mempengaruhi pertumbuhan pesat ekonomi kota-kota Jawa.

¹³ VOC, dibentuk 20 Maret 1602 bertujuan untuk mencegah persaingan antar pedagang Belanda, menyaingi kongsi dagang Inggris di India, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, melaksanakan monopoli perdagangan

¹⁴ Atlas Isaac de Graaf, ARA-VEL 1157 dalam Gill, 1995 menyebutkan 15 wilayah yang diurutkan dari posisi barat hingga timur Pulau Jawa : Bantam, Tangerang, Batavia, Tanjong Pora, Cherebon, Tegal, Samarang, Gogoden, Japara, Rembang, Cartasoura di Ningrat, Sourabaja, Kadiry, Stad Balambonang, Dystricton onder Sourapatty.

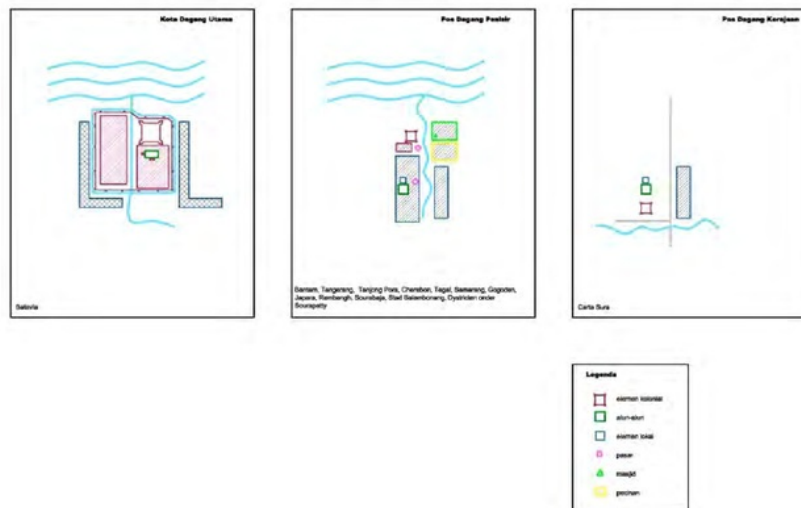
¹⁵ Lihat ilustrasi Santoso(2006:174-184) tentang kota Banten di abad 16

ruang kota di wilayah koloni dengan wilayah pribumi berbeda dan tidak memiliki pengikat yang jelas. Pada wilayah koloni sendiri, segera setelah kinerja pos dagang berjalan stabil, didirikan benteng koloni yang fungsi utamanya sebagai gudang penimbunan komoditas perdagangan sebelum dikapalkan ke Eropa.

Pada periode ini terdapat tiga karakter kota yang spesifik : kota koloni pertama, kota pelabuhan-Islam, kota kerajaan Mataram.

1600 - 1700

Pos Dagang
 Elemen utama kolonial : Loji, Gudang, Benteng
 Ekonomi : Monopoli komoditas Nusantara;
 Geografis : Kota-kota pelabuhan pantai utara



Gambar 1. Tipologi kota Jawa periode 1600-1700
 Sumber : Analisa, 2013

Periode 1700-1800

Pada beberapa kota pelabuhan yang strategis, terjadi konsentrasi koloni yang cukup besar sehingga koloni pos dagang berkembang menjadi kota dengan benteng keliling seperti dibangun di Semarang akhir abad 17¹⁶, Surabaya di awal abad 19¹⁷. Penataan kota yang dikelilingi benteng ini mirip dengan kota-kota Eropa abad pertengahan (quote). Mengacu pada penelusuran peta historis, pada kurun waktu abad 18 hingga 19 tipologi kota benteng di Jawa hanya ditemukan di Semarang, Surabaya, Yogyakarta dan Surakarta. Pada kasus benteng kota Surakarta (1745) dan Yogyakarta (1756) kota benteng ditujukan untuk kepentingan keraton, sementara koloni Belanda di kedua kota tersebut menggunakan tipologi benteng koloni (Vredenburg dan Vastenburg).

Teritori kolonial Belanda atas Jawa di paruh abad 18 telah mencapai separuh Jawa¹⁸. Sebagian Mataram dan Banten merupakan wilayah administrasi otonom, meskipun demikian jika melihat kontrak-kontrak politik yang terjadi pada abad ini (Mataram, 1749; Banten, 1752) sesungguhnya sebagian Jawa sudah ada dalam pengaruh kolonial Belanda.

¹⁶ Menurut Purwanto, 2005, benteng kota sebagai pertahanan VOC atas ancaman keamanan karena banyaknya pemberontakan di Jawa. Sementara Widodo (1998) menggambarkan selesainya benteng kota di 1697 sebagai awal perpindahan pusat administrasi VOC di pantai utara dari Jepara ke Semarang.

¹⁷ Menurut Handinoto, 2007 benteng Surabaya dibuat sebagai pertahanan terhadap ancaman armada Inggris

¹⁸ Lihat Peta Cribb, 2010.

Setelah keikutsertaannya dalam penundukan Trunojoyo di 1678-1681, VOC menjadi unsur tetap dalam percaturan politik Jawa. Perusahaan secara bertahap pindah dari sebuah kekuatan perdagangan maritim menjadi pengelola teritorial kerajaan Jawa. Meskipun demikian, sebisa mungkin VOC membatasi diri tidak turun langsung dalam administrasi harian di teritorinya¹⁹, akan tetapi melibatkan penguasa lokal, yaitu Bupati. Keberadaan penguasa lokal membantu VOC menjamin kestabilan kondisi ekonomi politik.

Hingga akhir abad 18, sistem administrasi penguasaan koloni Belanda di Jawa menggunakan sistem *gouvernementen* yang cenderung otonom satu sama lain²⁰. Administrasi utama – bahkan kantor utama VOC di Asia – adalah di Batavia dengan dipimpin Gubernur Jendral. Mengacu pada peta Cribb (2010), wilayah lain yang dipimpin oleh pejabat setingkat Gubernur²¹ di Jawa adalah : Banten, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Tapal Kuda (Pasuruan dan sekitarnya). Wilayah-wilayah inilah yang dinilai koloni memiliki posisi paling strategis di Jawa. Kota-kota pantai merupakan wilayah teritori VOC yang dijadikan pusat pertukaran komoditas dengan pasar dan pelabuhan internasionalnya. Sementara kota pedalaman Yogyakarta dan Surakarta strategis secara politik karena kepentingan VOC menjaga stabilitas para penerus dinasti Mataram (Lombard, 1996).

Banyaknya pemberontakan dan suksesi kekuasaan di Jawa sepanjang abad 18 menyebabkan tidak banyak wilayah yang cukup stabil untuk berkembang menjadi kota yang kompleks. Wilayah-wilayah pesisir utara dapat dikatakan cukup berkembang sejak pertengahan abad karena penguasaan teritori oleh VOC yang mengusahakan kestabilan politik demi perdagangan yang baik. Sementara kota-kota pedalaman seperti Kediri, Kartasura tidak lagi menjadi pusat pertumbuhan karena ditinggalkan penguasanya. Proses suksesi kekuasaan Mataram pada abad 18 merupakan puncak intervensi Belanda pada politik Jawa. Politik pecah belah Belanda mencapai hasil terbaik pada Perjanjian Giyanti (1755) yang membagi Mataram menjadi dua kekuasaan yang lebih kecil: Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Selanjutnya Belanda berhasil mengurangi lagi wilayah kekuasaan Surakarta dengan membentuk Kadipaten Mangkunegaran. Pembagian kekuasaan atas pewaris dinasti Mataram ini menghasilkan stabilitas politik di Jawa selama ¾ abad selanjutnya.

Pada periode ini terdapat tiga karakter kota yang spesifik secara bentuk dan strukturnya : kota benteng awal, kota benteng lanjut, dan kota kosmologi kerajaan .

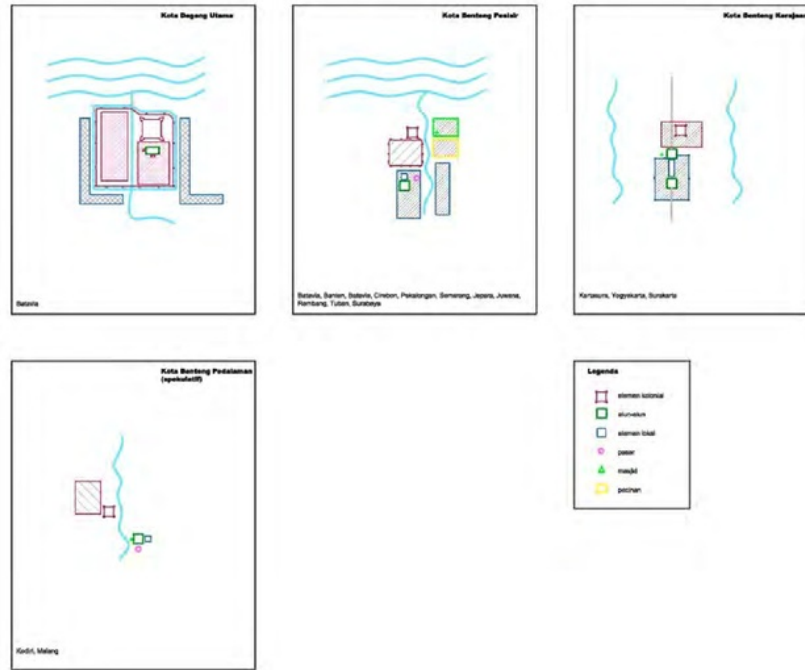
¹⁹ Cribb, 2010 : chapter 3

²⁰ Ibid : chapter 4

²¹ Sebelum perubahan sistem administrasi oleh Daendels di 1808, penamaan pejabat-pejabat VOC tidak menggunakan istilah administrasi pemerintahan melainkan administrasi perdagangan : *Opperkoopman* (gubernur, saudagar senior), *koopman* (saudagar), *onderkoopman* (saudagar junior), *boekhouder* (juru tulis).

1700 - 1800

Kota Benteng
 Elemen utama kolonial : kota perbentengan
 Politik : Intervensi suksesi Mataram
 Geografis : konsolidasi kota-kota pesisir dan kota-kota pelabuhan



Gambar 2. Tipologi kota Jawa periode 1700-1800
 Sumber : Analisa, 2013

Periode 1800-1900

Abad 19 dapat dikatakan merupakan abad perubahan, banyak peristiwa besar yang akan berdampak pada perubahan struktur perkotaan Jawa :

1. Jalan Raya Pos dibangun menghubungkan kota-kota di utara Jawa, dari Banten, Semarang, Surabaya hingga ujung timur Jawa.
2. Perubahan sistem administrasi politik-ekonomi
3. Perang Jawa
4. *Culture Stelsel*
5. *Agrarische Wet & Zuiker Wet*

Awal abad 19 merupakan titik balik perkembangan kota-kota Jawa. Bangkrutnya VOC di 1799 akibat korupsi, disikapi Marsekal HW Daendels dengan membentuk sistem administrasi yang baru. Kekuasaan Bupati di seluruh Jawa dikurangi, sistem perpajakan baru dibuat. Penerapan sistem administrasi baru ini segera terlihat pada struktur perkotaan di Jawa. Pusat administrasi koloni yang semula berpusat di benteng kota digantikan dengan elemen kantor dan rumah administrasi kota. Pejabat administrasi kolonial terdiri dari *residentie - asistentie residentie - controleur - asistentie controleur*. Sementara pejabat administrasi lokal terdiri dari bupati – wedana – camat – lurah. Lokasi para pejabat administrasi ini berbeda-beda di masing kota, meskipun demikian selalu akan menjadi penanda pusat administrasi kota

tersebut. Keberadaan pusat administrasi ini diikuti dengan elemen-elemen fungsi berupa *parade plein*, gereja dan penjara di pusat administrasi kolonial, sementara alun-alun dan masjid merupakan elemen yang selalu ada di dekat pusat administrasi lokal.

Meski masa pemerintahannya pendek (1808-1811) Daendels meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi Jawa : Jalan Raya Pos. Pada saat itu Daendels melihat ketiadaan akses darat yang baik antara kota-kota penting di Jawa. Kondisi ini akan melemahkan posisi pertahanan kota terhadap ancaman serangan Inggris, sehingga jalur darat yang membentang dari Anyer hingga Panarukan dibuat, menghubungkan kota-kota strategis di Jawa.

Pada masa pemerintahan Inggris, Raffles (1811-1816) meneruskan politik pecah belah Belanda dengan membentuk Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta. Usaha menciutkan kekuasaan lokal juga dilakukan dengan meneruskan kebijakan Daendels memangkas kekuasaan Bupati di Jawa. Walaupun pemangkasan kekuasaan lokal tersebut ditujukan untuk efisiensi dan mengurangi pungutan bagi petani, pada prakteknya kebijakan ini justru berakibat buruk bagi Belanda satu dekade berikutnya.

Tekanan berlebihan politik koloni pada para penguasa lokal menyebabkan meletusnya perang terbesar dalam sejarah Jawa, Perang Jawa. Perang terutama berlangsung di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya selama lima tahun (1825-1830). Perang Jawa menjadi momen dasar penentu kebijakan geopolitik dan ekonomi koloni Belanda di abad 19 yang sangat berpengaruh pada perkembangan kota-kota di Jawa :

1. Muncul kesadaran Belanda akan pentingnya penguasaan politik dan militer terhadap wilayah-wilayah produksi pertanian dan perkebunan di pedalaman Jawa. Belanda membuat wilayah-wilayah pertahanan dengan meletakkan garnisun dan benteng sehingga terbentuklah kota-kota garnisun di pedalaman Jawa²². Kota-kota garnisun yang tumbuh dan berkembang selama dan setelah Perang Jawa : Cimahi, Purworejo, Ambarawa, Magelang, Malang.
2. Muncul kebijakan *Cultur Stelsel* (tanam paksa) pada 1830 untuk mengembalikan posisi kas Belanda yang terkuras saat Perang Jawa. Kebijakan ini menguatkan struktur kota-kota Jawa yang terbagi menjadi kota-kota produksi di pedalaman Jawa dan kota-kota distribusi/pelabuhan di pesisir utara Jawa.

Perkembangan kota Jawa akhirnya dapat dikatakan matang pada akhir abad 19, dimana terjadi perubahan yang membuat konsentrasi ekonomi di perkotaan sedemikian menonjol. Liberalisasi ekonomi di Eropa telah mendorong kebijakan ekonomi kolonial berubah, penghapusan *Cultur Stelsel* dan penetapan *Agrarische Wet & Zuiker Wet*²³ menarik banyak pengusaha swasta Eropa menanamkan modalnya di perkotaan Jawa. Pengembangan usaha yang paling menonjol adalah perkebunan dengan komoditas utama gula, kopi dan teh. Kota-kota pedalaman seperti Bandung, Yogyakarta, Malang tumbuh pesat menjadi kota pengumpul hasil produksi dari hinterlandnya. Sementara kota-kota pesisir dengan pelabuhan besar berkembang menjadi kota perdagangan²⁴. Jaringan infrastruktur baru berupa jalan kereta api muncul sebagai penghubung antara kota pengumpul di pedalaman dengan kota dagang di pesisir. Elemen-elemen fungsi perkotaan yang sangat berkembang pada masa ini adalah kantor dagang, bank, stasiun, kantor pos dan telegraf.

Pada periode ini terdapat tiga karakter kota yang spesifik secara bentuk dan strukturnya : kota pusat ganda, kota pusat tunggal, dan kota kawasan militer.

²² Handinoto (2010):

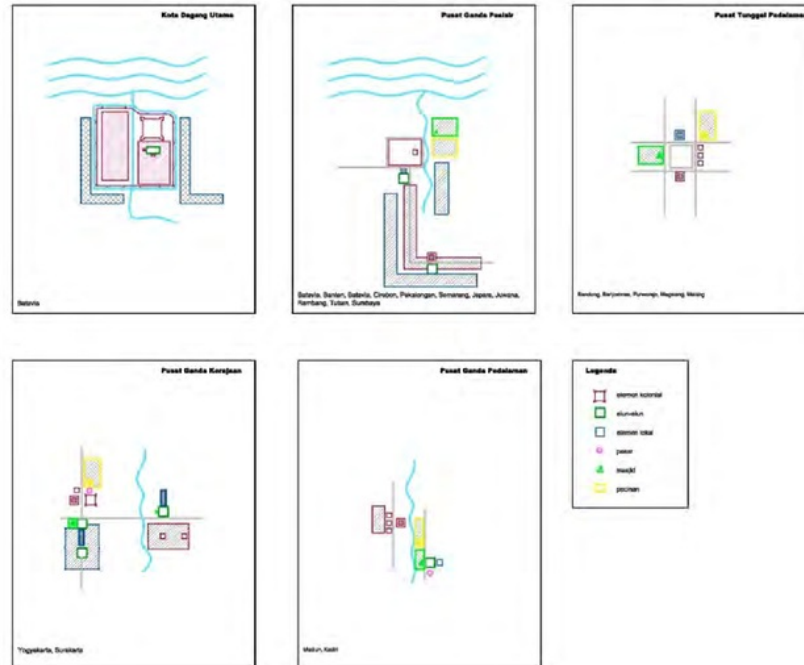
²³ Undang-undang Agraria 1870 menetapkan negara memberikan ijin pada pihak swasta untuk menyewa tanah koloni untuk usaha perkebunan (Handinoto, 2010, 392)

²⁴ Mengenai fungsi perkotaan Jawa sebagai kota produksi-distribusi-perdagangan dibahas mendalam oleh Gill, 1995:219-221 dan Handinoto, 2010:382

1800 - 1870

Kota Administrasi Terpadu

Elemen utama : Kantor pos, Kantor NHM, Rumah/Kantor Residen
 Politik : Revolusi Prancis, intervensi Inggris, Perang Jawa, Administrasi Daendels-Raffles
 Geografis : Jalan raya pos, eksplorasi pedalaman
 Ekonomi : VOC bangkrut, resesi ekonomi Belanda, defisit Perang Jawa, Cultuur Stelsel



Gambar 3. Tipologi kota Jawa periode 1800-1900
 Sumber : Analisa, 2013

Periode 1900-1942

Pertumbuhan penduduk dan ekonomi perkotaan pada periode liberalisasi sungguh pesat dan berakibat pada urbanisasi kota-kota di Jawa, terutama kota-kota besar dan strategis. Kapasitas daya dukung kota dengan segera dilampaui dan timbul permasalahan seperti kurangnya lahan untuk permukiman, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana perkotaan dan kesehatan perkotaan. Sementara itu secara umum sistem Residensi yang sentralistik tidak memungkinkan untuk melakukan intervensi terhadap masalah perkotaan yang mendasar semacam itu – selain itu juga karena tidak adanya sumber daya manusia dan keuangan yang memadai. Karena banyaknya tekanan, Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mendesentralisasi administrasi untuk menghadapi perubahan sosial-ekonomi dan demografi yang terjadi, selain itu juga menyesuaikan skala permasalahan di tingkat lokal. Penetapan Peraturan Desentralisasi (*Decentralisatiewet*) pada tahun 1903 dan disusul pembentukan Dewan Peraturan Daerah (*Lokaal Radenordonnantie*) pada tahun 1905 memberikan kerangka hukum yang diperlukan. Tugas dan tanggungjawab Departemen Pekerjaan Umum (*Burgerlijke Openbare Werken*) dan Departemen Dalam Negeri (*Binnenlands Bestuur*) pada periode ini diserahkan kepada pejabat setempat²⁵.

Sejak 1903, secara bertahap ibukota karesidenan di Jawa diberikan status *Gemeente* (Kotamadya). Batavia, Meester Cornelis dan Buitenzorg adalah kota-kota awal yang mendapat status ini. Pada tahun 1922, dikeluarkan *Bestuurs-hervormings Ordonantie* yang merubah desentralisasi pemerintahan menjadi dekonsentrasi. Tahun 1926 muncul lagi peraturan tentang kotamadya dan propinsi, *Gemeente* dirubah menjadi *Stadgemeente* dan Jawa dibagi dalam 3 wilayah besar yang disebut propinsi : Jawa Barat, Jawa

²⁵ Pembahasan mendalam mengenai latar belakang desentralisasi kota-kota Jawa abad 20 dilakukan oleh Roosmalen (2008).

Tengah, dan Jawa Timur²⁶. Hingga tahun 1942, kota-kota dengan status *Stadgemeente* di Jawa berjumlah 18 (Handinoto, 2010) : Batavia, Meester Cornelis, Buitenzorg, Bandung, Cirebon, Sukabumi, Pekalongan, Tegal, Semarang, Magelang, Salatiga, Madiun, Blitar, Kediri, Malang, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo

Bentuk dan struktur pusat kota yang sudah muncul sebelumnya tidak berubah pada periode ini, secara umum pusat kota awal tetap menjadi titik sentral perkembangan kawasan-kawasan baru. Paling mencolok dalam periode ini adalah pembukaan kawasan baru di pinggiran kota, baik untuk kepentingan area permukiman atau perkantoran.

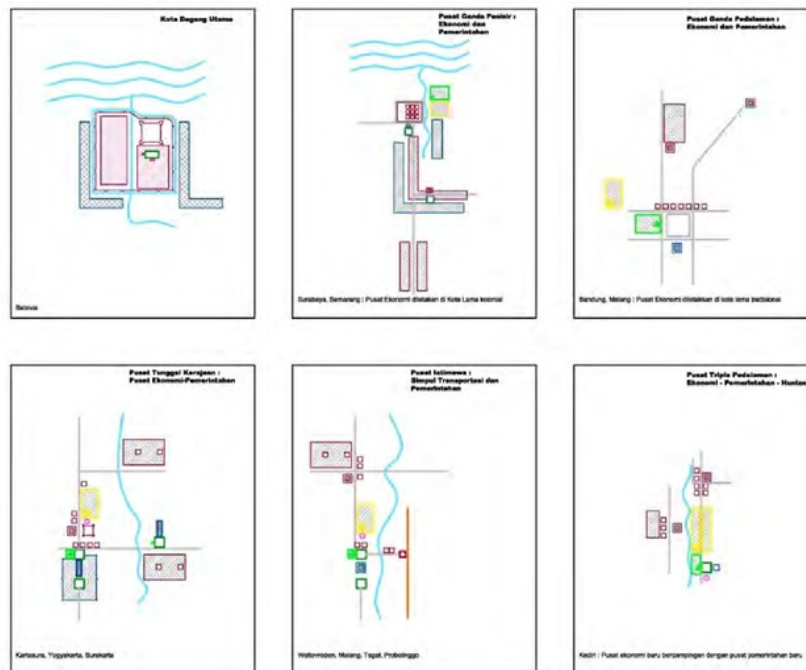
1870 - 1942

Kota Pusat Distribusi-Produksi - Gementee

Politik : UU Agraria, UU Gula, Politik Etis, Desentralisasi kota

Ekonomi : Liberalisasi, infrastruktur kereta

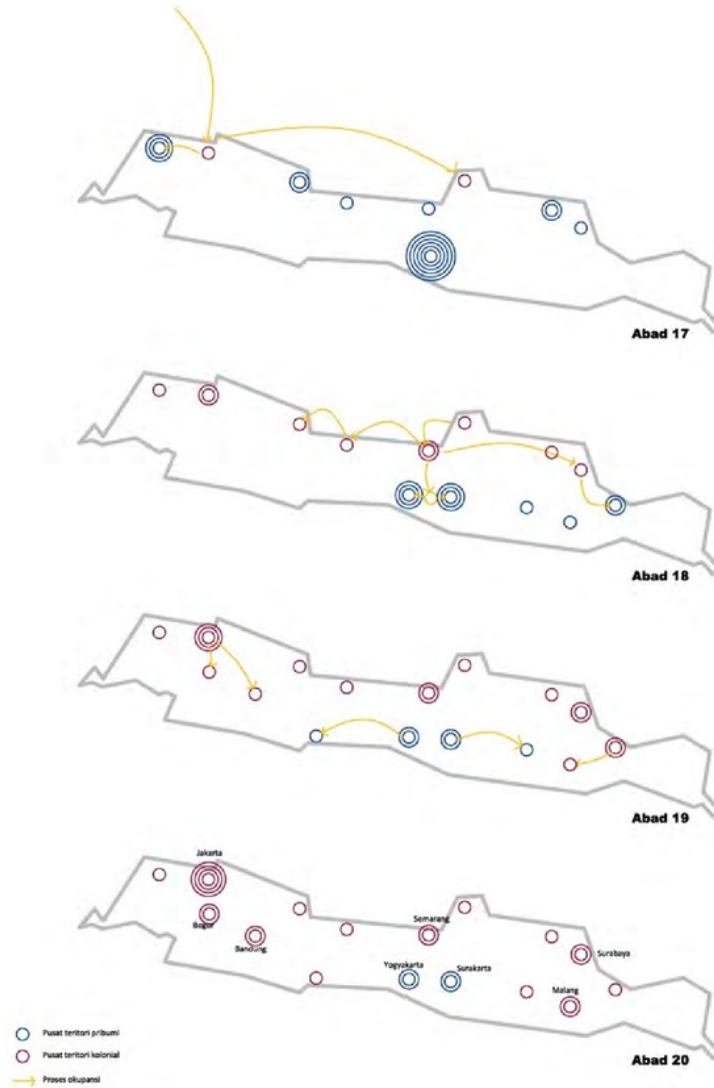
Elemen utama kolonial : Stasiun, kantor dagang swasta, Rumah/Kantor walikota



Gambar 4. Tipologi kota Jawa periode 1900-1942
 Sumber : Analisa, 2013

²⁶ Pembagian wilayah ini bukan merupakan hal baru, pada periode Van den Bosch pasca perang Jawa, Jawa sudah terbagi dalam 3 wilayah kemiliteran. Pembagian wilayah propinsi hampir semuanya mengikuti pembagian wilayah kemiliteran tersebut (Gill, 1995).

SIMPULAN UMUM



Gambar 5. Model Pengaruh Kolonialisme dalam Tranformasi Perkotaan Jawa

Sumber : Analisa, 2013

Secara umum pendekatan tipomorfologi dapat membantu perencana dan perancangan kota dalam memahami secara komprehensif : transformasi, struktur dan elemen-elemen kota di Jawa.

Temuan dalam beberapa periode tersebut diatas dapat dirangkum dalam poin-poin berikut :

1. Tahapan kolonisasi – menentukan periode lahir, berkembang dan dewasanya suatu kota, dalam hal ini faktor politik berperan. Tahap awal Belanda menguasai kota-kota pantai, tahap selanjutnya baru masuk ke kota-kota pedalaman.

2. Lokasi geografis menentukan fungsi kota – kota-kota pantai dikembangkan sebagai kota dagang, sementara kota-kota pedalaman difungsikan sebagai kota produksi/perkebunan, militer dan peristirahatan.
3. Sistem administrasi menjadi penentu bentuk ruang pusat kota (skala meso), terdapat variasi gabungan dari konsep kosmologi Jawa dengan konsep rasional kota kolonial. Perbedaan di tiap varian tergantung kepada tahapan kolonialisasi di wilayah tersebut.
4. Infrastruktur dikembangkan sesuai tahapan. Tahapan awal adalah pengembangan pelabuhan-pelabuhan di kota-kota pantai dengan konsentrasi perdagangan internasional. Tahapan selanjutnya adalah pengembangan jalan darat dan jaringan kereta api yang menjangkau kepada kota-kota pedalaman dengan konsentrasi perkebunan.
5. Eksplorasi Jawa untuk perkebunan digabung dengan liberalisasi ekonomi Eropa menjadikan perkembangan perkotaan yang pesat di abad 19. Wilayah-wilayah perkebunan dan peristirahatan berkembang menjadi kota, kota-kota administrasi yang sudah ada sebelumnya menjadi kota yang lebih kompleks, kota-kota dagang awal di abad 18 berkembang menjadi kota-kota besar Jawa.
6. Pertengahan abad 20, hampir semua kota-kota Jawa telah menemukan kedewasaannya. Pemerintahan kolonial meletakkan infrastruktur dan struktur yang relatif lengkap, elemen-elemen kota telah sepenuhnya berfungsi. Kota-kota dengan infrastruktur lengkap dan kondisi geografis mendukung sepenuhnya berkembang menjadi kota-kota besar Jawa (Jakarta, Semarang, Surabaya), sedangkan kota-kota dengan fungsi khusus sebagai kota pendidikan, militer dan administrasi berkembang menjadi kota-kota menengah (Bandung, Jogja, Solo, Malang).

PUSTAKA

- Akihary, H. 1988. *Architectuur & Stedebouw in Indonesie 1870/1970*. Zutphen: De Walburg Pers.
- Basundoro, P. 2012. *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Con, E.N. 1974. *Design of Cities*. London: Thames & Hudson
- Carmona, M., Heath, T., Oc, T. & Tiesdell, S. 2003. *Public Places Urban Spaces, The Dimensions of Urban design*. Architectural Press.
- Colombijn, F., Barwegen, M., Basundoro, P., Khusyairi, J.A. 2005. *Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Cribb, R. 2010. *Digital Atlas of Indonesian History*. Australia: NIAS Press.
- Cuthbert, A.R. 2006. *The Form of Cities, Political Economy and Urban Design*. Malden: Blackwell Publishing.
- Gill, R.G. 1995. *De Indische Stadt Op Java en Madura – Een Morfologische Studie Van Haar Ontwikkeling*. Disertasi. Technische Universiteit Delft.
- Handinoto. 1996. *Pembangunan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya (1870-1940)*, LPPM Univeritas Kristen Petra, Surabaya – Andi, Yogyakarta
- Handinoto. 2010. *Arsitektur dan Kota-kota di Jawa pada Masa Kolonial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Heufel, C.vd. 2005. *'De Huysbou', A reconstruction of an unfinished treatise on architecture, town planning and civil engineering by Simon Stevin*. Amsterdam : Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.
- Kostof, Spiro. 1991. *The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History*, Thames and Hudson Ltd. London.
- Kostof, Spiro. 1992. *The City Assembled: The Elements of Urban Form Through History*, Thames and Hudson Ltd. London.
- Lombard, D., 1996. *Nusa Jawa Silang Budaya : Batas-batas Pembaratan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lombard, D., 1996. *Nusa Jawa Silang Budaya : Jaringan Asia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lombard, D., 1996. *Nusa Jawa Silang Budaya : Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moudon, AV. 2003. 'A Catholic Approach to Reorganizing what Urban Designers Should Know' dalam Cuthbert, A.R., (ed). *Designing Cities, Critical Readings in Urban Design*. Malden: Blackwell Publishing. Hal 362-386.
- Nas, P.J.M. 1986. *Introduction : A General View of the Indonesian Town* in Nas, P.J.M (ed). *The Indonesian City*. Dordrecht: Foris Publication Holland.

10

Nas, P.J.M. 1986. *The Early Indonesian Town : Rise and Decline of the City-State and its Capital* in

4 Nas, P.J.M (ed). *The Indonesian City*. Dordrecht: Foris Publication Holland.

Panerai, P., Castex, J., Depaule, J.C., Samuels, I. 2004. *Urban Forms, The Death and Life of The Urban Block*. Oxford: Architectural Press

Pinzon Cortes, C.E. 2009. *Mapping Urban Form. Morphology studies in the contemporary urban landscape*. Disertasi Ph.D. de Technische Universiteit Delft. Netherlands.

Roosmalen, P.van. 2008. *Ontwerpen aan de stad Stedenbouw in Nederlands-Indië en Indonesië (1905-1950)*. Disertasi. Ph.D. Technische Universiteit Delft.

Santoso, Jo. 2006. *[Menyiasati] Kota Tanpa Warga*. Kepustakaan Populer Gramedia – Centropolis, Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Soekiman, D. 2011. *Kebudayaan Indis, Dari Zaman Kompeni sampai Revolusi*. Jakarta: Komunitas Bambu.

5 Siregar, S.A., 1990. *Bandung, the Architecture of a City in Development: urban analysis of a regional capital as a contribution to the present debate on Indonesian urbanity and architectural identity*. Disertasi Ph.D. Katholieke Universiteit Leuven, Belgium. Leuven

Sumalyo, Y. 1988. *L'architecture Coloniale Hollandaise en Indonesie*. Disertasi.Dr. Ecole des Hauts Etudes en Sciences Sociales Paris.

8 Wiryomartono, A.B.P., 1995. *Seni Bangunan dan Seni Binakota di Indonesia; Kajian mengenai konsep, struktur, dan elemen fisik kota sejak peradaban Hindu-Budha, Islam hingga sekarang*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Widodo, J.W. 2004. *The Boat and The City, Chinese Diaspora and the Architecture of South East Asian Coastal Cities*. Marshall Cavendish Academic, Singapore.

Seminar Nasional Riset Arsitektur dan Perencanaan (SERAP) 3
MANUSIA dan RUANG dalam ARSITEKTUR dan PERENCANAAN
22-23 Agustus 2014, Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada
Jalan Grafika No.2 Kampus Bulaksumur UGM Yogyakarta

SERAP, SEminar Riset Arsitektur dan Perencanaan, merupakan seminar berkala dua tahunan yang diadakan oleh kelompok mahasiswa dan alumni S3 Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan (JUTAP) UGM yang tergabung dalam APRF (Architecture and Planning Research Forum). Diawali tahun 2010 dengan SERAP 1 dan tahun 2012 dengan SERAP 2, maka pada tahun ini, APRF mengadakan SERAP 3 pada tanggal 22-23 Agustus 2014 sebagai ajang diskusi hasil penelitian. Tidaklah berlebihan, jika dikatakan bahwa SERAP merupakan wadah mendesiminasikan hasil-hasil penelitian, baik bagi para mahasiswa S2/S3 maupun para peneliti dari akademisi dan praktisi.

Manusia dengan budaya dan pemikirannya akan selalu mempengaruhi tata ruang lingkungannya. Pergerakan dinamis yang melibatkan antara manusia – budaya – fisik keruangan telah memberikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Serap 3 kali ini mengambil tema "Manusia dan Ruang dalam Arsitektur dan Perencanaan" akan mewadahi hasil-hasil penelitian dalam lingkup arsitektur dan perencanaan, baik dalam skala makro, meso dan mikro.



ISBN 978-979-98815-6-4



9 789799 881564

Pengaruh Kolonialisme pada Morfologi Ruang Kota Jawa

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	5%
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
3	d-nb.info Internet Source	1%
4	www.northernarchitecture.us Internet Source	1%
5	dokumen.tips Internet Source	1%
6	revistaurbanismo.uchile.cl Internet Source	1%
7	A. V. Moudon. "A Catholic Approach to Organizing What Urban Designers Should Know", Journal of Planning Literature, 05/01/1992 Publication	1%
8	silabus.upi.edu Internet Source	1%

9

teknik.ub.ac.id

Internet Source

1%

10

www.leidenuniv.nl

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On